

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI	i
SURAT PERNYATAAN PENULIS	ii
IKHTISAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ix
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	12
1. Tujuan penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	22
F. Langkah-Langkah Penelitian	24
1. Metode Penelitian	24
2. Lokasi Penelitian.....	25
3. Sumber Data Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	27
Teknik Analisis Data Penelitian.....	27
BAB II SISTEM PENGUPAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAMdan SISTEM HUKUM INDONESIA	
A. Teori Negara Hukum Terhadap Perjanjian Kerja	30
B. Teori Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan.....	32
C. Teori Pengupahan Terhadap Perjanjian Kerja	33
1.Sistem Penggajian dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Perusahaan Manufaktur	51
2.Indikator Untuk Menentukan Besaran Gaji dan Upah.....	54
3.Hambatan Melaksanakan Putusan MK Terkait Pengesahan PKWTT dan Peralihan Status Hubungan Kerja.....	56

BAB III KONDISI OBJEKTIF PELINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung	65
1. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dinas	65
A. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Atas Upah	80
1. Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah.....	80
2. Hubungan Kerja, Waktu Kerja, Istirahat, Dan Waktu Cuti.....	85
3. Pemutusan Hubungan Kerja pada Pekerja PKWT	95
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi	
1. Pelanggaran Upah Terhadap Tenaga Kerja	105
2. Ancaman Pidana Bagi Pengusaha yang Membayar	
Upah di Bawah Upah Minimum	107

BAB IV PENGUPAHAN BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI KOTA BANDUNG

A. Faktor Tidak Terlaksananya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terkait Dengan Sistem Pengupahan	109
B. Sistem Pengupahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Hubungkan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.....	118
C. Perlindungan Hukum atas Upah yang diterima Tenaga Kerja dalam PKWT	
Oleh Suatu Perusahaan di Kota Bandung	122
1. Masalah Pengupahan.....	123
2. Kebijakan Pendapatan atau Pengupahan	125
3. PKWT Bertentangan Dengan Konsep Hubungan Industrial Yang Diatur Oldeh UU Ketenagakerjaan.....	130
4. PKWT Meredusir Pelaksanaan Undang-Undang Sosial Tenaga Kerja.....	132

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	144
B. Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG